

20
25



LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH

LKjIP

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

KATA PENGANTAR

Kami ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kedua peraturan ini menjadi landasan bagi penyusunan LKjIP, sehingga laporan ini diharapkan dapat memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi yang ditetapkan.

LKjIP ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Melalui LKjIP ini, kami ingin menggambarkan penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta keberhasilan capaian sasaran dalam meningkatkan kualitas kinerja. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang selama tahun 2025.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah kami susun ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang di masa mendatang. Kami menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, dan laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi kami untuk terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Semarang.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT KOTA SEMARANG**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat kondisi atau hal-hal yang perlu untuk ditindaklanjuti dalam laporan kinerja ini.

Semarang, 20 Februari 2026
Pit. Inspektur Kota Semarang


Dr. Sumardi, M.Si, CFA
NIP. 19570817 198803 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai Rancangan RPJMD Kota Semarang 2021-2026, telah ditetapkan 5 (lima) program RPJMD Kota Semarang. Dari kelima program tersebut, terdapat 1 (satu) misi/program yang merupakan bagian penugasan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, yaitu: **“Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota”**. Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah

1. Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.
2. Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang antara lain:

1. Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob.

Dengan meningkatnya kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang yang optimal diharapkan dapat terwujud Kota Semarang yang bebas dari banjir dan rob sehingga dapat meningkatkan kualitas Kota Semarang untuk mencapai kota yang tangguh, produktif dan berkelanjutan.

2. Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan.

Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan merupakan penunjang dalam aktivitas masyarakat kota Semarang untuk menjadi lebih tangguh dan produktif.

3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD

Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD menjadi kunci awal keberhasilan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat Kota Semarang.

Realisasi kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tergambar pada tabel berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2025			Realisasi tahun 2024
			Target	Realisasi	Satuan	
1.	Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	Persentase kawasan banjir.	1,88	1,73	Persen	2,23
		Persentase kawasan rob.	1,05	0,98	Persen	1,06
2.	Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap.	94,00	94,008	Persen	93,27
		Persentase jembatan dalam kondisi baik.	91,91	92,44	Persen	91,90

3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	77,36	77,50	Skor 1 - 100	77,35
4.	Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang pada Dinas Pekerjaan Umum	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang pada Dinas Pekerjaan Umum	278.380.000	409.141.000	Rp	487.971.000

Untuk realisasi indikator kinerja program terangkum dalam tabel berikut:

Kode	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024
			Target	Realisasi	Satuan	
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum	100	100	%	100
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan dinas pekerjaan umum	100	100	%	100
		Persentase peningkatan kemampuan ASN dinas Pekerjaan Umum	100	100	%	100
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98,44	98,64	%	97,33
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	67,00	67,00	%	66,00
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kualitas Infrastruktur jalan jembatan	75,30	93,224	%	92,58

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja antara lain:

- Proses pengadaan tanah untuk pelebaran dan peninggian Jembatan Kali Beringin mengalami kendala akibat adanya perbedaan persepsi dengan pemilik lahan mengenai luas bidang tanah yang akan dibebaskan. Pemilik lahan mengajukan tuntutan agar seluruh bidang tanah yang terdampak proyek dibebaskan.

Dan langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh ialah:

- Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan upaya negosiasi ulang dengan pemilik lahan untuk mencari titik temu terkait luas tanah yang akan dibebaskan. Dalam proses negosiasi ini, tim teknis akan melibatkan pihak terkait untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kepentingan semua pihak.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	IV
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Isu Strategis dan Permasalahan	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Visi dan Misi	5
2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	6
2.3 Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	11
3.2 Analisis Capaian Kinerja	15
3.3 Akuntabilitas Keuangan	19
3.4 Analisis Efisiensi Sumberdaya	23
3.5 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut	25
BAB IV PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kota Semarang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja instansi pemerintah serta untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Dasar hukum tersebut menjadi landasan dalam penyusunan, pelaksanaan, serta pelaporan sesuai dengan standar yang proporsional dan profesional serta transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tahun berikutnya.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, dan Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan Bidang Pendayagunaan Infrastruktur;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dan UPTD;
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
5. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan Bidang Pendayagunaan Infrastruktur;
6. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
7. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dan UPTD;
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dan UPTD;
9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 ISU STRATEGIS DAN BERBAGAI PERMASALAHAN

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, hasil telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, hasil telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah, hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Semarang melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas dan kemantapan jalan kota guna mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Pengendalian banjir dan genangan sebagai dampak perubahan iklim, peningkatan curah hujan, dan perkembangan kawasan perkotaan;
- c. Ketersediaan dan keandalan sistem drainase perkotaan;
- d. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah;
- e. Peningkatan kualitas layanan infrastruktur publik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain:

1. Keterbatasan anggaran daerah dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
2. Kondisi infrastruktur eksisting yang memerlukan peningkatan kualitas secara bertahap;
3. Dampak perubahan iklim yang meningkatkan risiko banjir dan kerusakan infrastruktur;
4. Keterbatasan lahan dan kompleksitas penataan kawasan perkotaan;
5. Perlunya peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan;

6. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Permasalahan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program serta peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

Sesuai dengan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengacu pada visi dan misi Walikota Semarang terpilih yaitu,

“Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat yang Berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI Berbhinneka Tunggal Ika”

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial;
- b. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi pancasila;
- c. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan;
- d. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota;
- e. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, dalam mewujudkan misi ke-empat **“Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota”** tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang melaksanakan tiga program yaitu:

1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - a. Mengubah air dari masalah (banjir dan rob) menjadi potensi (water as leverage);
 - b. Smart Water Management.

2. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
 - a. Penghijauan sempadan sungai semarang.
3. Program Peningkatan Konektivitas Wilayah
 - a. Rintisan Semarang Outer Ring Road (Mangkang-Mijen) dan Middle Ring Road (Jalan Gajah)
 - b. Pembangunan akses perguruan tinggi (Srandol-Sekaran, Undip-Jangli-Mrican, Sekaran-Tinjomoyo)

2.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan rumusan tersebut maka ditentukan Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Visi: "Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat yang Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Berbhinneka Tunggal Ika"			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.	1. Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.	1. Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob.	1. Persentase kawasan banjir; 2. Persentase kawasan rob.
	2. Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap.	1. Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan; 2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD.	1. Persentase jalan dalam kondisi mantap; 2. Persentase jembatan dalam kondisi baik; 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

2.3 PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan sedangkan Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan juga merupakan aspek operasional nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Secara umum indikator kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	1. Persentase kawasan banjir	1,88%
		2. Persentase kawasan rob	1,05%
2.	Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	1. Persentase jalan dalam kondisi mantap	94,00%
		2. Persentase jembatan dalam kondisi baik	91,91%
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	77,20%

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai, yang mencakup kebijakan, program dan kegiatan. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, sekaligus menunjukkan distribusi anggaran antar program utama dan kegiatan operasional di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dirincikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.2
Alokasi Anggaran Program Kegiatan Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	DINAS PEKERJAAN UMUM		
	DINAS PEKERJAAN UMUM		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.140.389.102	19,56
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	57.920.001.459	15,08
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	57.820.510.920	15,05
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	137.436.161.217	35,78
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.241.196.255	0,58
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV		
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.289.038.319	0,60
	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum		
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	31.536.493.560	8,21
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.996.045.402	0,78
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II		
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	4.414.472.583	1,15
	UPTD Peralatan dan Perbengkelan		
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	9.170.825.140	2,39
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III		
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	3.113.857.013	0,81
	JUMLAH	384.078.990.970	100

Berdasarkan Tabel 2.3.2, total alokasi anggaran program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 sebesar Rp384.078.990.970. Komposisi anggaran tersebut tersebar pada beberapa program strategis dan kegiatan pendukung yang dilaksanakan baik di tingkat dinas maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Alokasi anggaran terbesar terdapat pada Program Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp137.436.161.217 atau 35,78%, yang menunjukkan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan masih menjadi prioritas utama dalam mendukung konektivitas wilayah dan mobilitas masyarakat.

Selanjutnya, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memperoleh anggaran Rp75.140.389.102 atau 19,56%, mencerminkan kebutuhan dukungan manajerial, administrasi, dan operasional perangkat daerah guna menjamin kelancaran pelaksanaan program teknis.

Program strategis lainnya meliputi Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp57.920.001.459 (15,08%) dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase sebesar Rp57.820.510.920 (15,05%). Besaran anggaran yang relatif seimbang pada kedua program ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pengendalian banjir, peningkatan layanan air, serta pengelolaan sistem drainase perkotaan.

Pada tingkat UPTD, alokasi anggaran relatif lebih kecil namun berperan penting dalam operasional pemeliharaan infrastruktur di wilayah. Di antaranya:

- ❖ UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I sebesar Rp2.241.196.255 (0,58%);
- ❖ UPTD Wilayah IV sebesar Rp2.289.038.319 (0,60%);
- ❖ UPTD Wilayah II sebesar Rp4.414.472.583 (1,15%),
- ❖ UPTD Wilayah III sebesar Rp3.113.857.013 (0,81%).

Selain itu, dukungan logistik dan teknis melalui UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum tercermin dalam alokasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase sebesar Rp31.536.493.560 (8,21%) serta Program Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp2.996.045.402 (0,78%). Sementara UPTD Peralatan dan Perbengkelan memperoleh anggaran

Rp9.170.825.140 atau 2,39% untuk mendukung kesiapan peralatan konstruksi dan pemeliharaan.

Secara keseluruhan, struktur anggaran menunjukkan bahwa fokus utama belanja masih diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, pengelolaan sumber daya air, serta sistem drainase, dengan dukungan program penunjang dan operasional UPTD guna memastikan efektivitas pelayanan infrastruktur kepada masyarakat.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Evaluasi Kinerja dilakukan dengan cara menghitung Pengukuran Kinerja dari pelaksanaan kegiatan / program/ kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Dalam pengukuran evaluasi kinerja, selain dari aspek keuangan juga dikaji melalui aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Evaluasi yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang untuk input meliputi :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Dana baik DAU maupun DAK yang terdiri dari:
 - a. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung
 - b. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.1
Capaian Kinerja Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI
NO	URAIAN	NO	URAIAN			
1		1		3	4	5
1	Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	1	Persentase kawasan banjir	%	1,88	1,73
		2	Persentase kawasan rob	%	1,05	0,98
2	Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	94,00	94,008
		2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	91,91	92,44

3	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Skor 1-100	77,36	77,50
4	Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang pada Dinas Pekerjaan Umum	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang pada Dinas Pekerjaan Umum	Rp	278.380.000	409.141.000

Berdasarkan tabel 3.1.1 Capaian kinerja tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mendeskripsi Tingkat keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Pada sasaran pertama, yaitu meningkatnya kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob, indikator persentase kawasan banjir ditargetkan sebesar 1,88% dengan realisasi 1,73%, sedangkan persentase kawasan rob ditargetkan 1,05% dengan realisasi 0,98%. Capaian ini menunjukkan bahwa luas kawasan terdampak banjir dan rob lebih rendah dari target yang ditetapkan, sehingga dapat dikatakan kinerja pengendalian banjir dan rob berjalan dengan baik.

Sasaran kedua, yaitu meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan, menunjukkan bahwa persentase jalan dalam kondisi mantap ditargetkan sebesar 94,00% dan terealisasi sebesar 94,008%. Adapun persentase jembatan dalam kondisi baik ditargetkan 91,91% dengan realisasi 92,44%. Capaian ini menunjukkan bahwa capaian kinerja jalan dalam kondisi mantap dan jembatan dalam kondisi baik telah melampaui dari yang ditargetkan.

Sedangkan pada sasaran ketiga, yaitu meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD, diukur melalui Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target skor 77,36 dan realisasi 77,50. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas akuntabilitas dan tata kelola kinerja instansi.

Pada sasaran keempat, yaitu tercapainya target pendapatan asli daerah kota semarang pada dinas pekerjaan umum, indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah pendapatan asli daerah kota semarang pada dinas pekerjaan umum dengan satuan rupiah (Rp). Target yang ditetapkan sebesar Rp 278.380.000, sedangkan realisasi mencapai Rp 409.141.000, Dimana

realisasi yang tersebut telah melampaui yang nilai yang telah ditargetkan. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pencapaian pendapatan asli daerah pada Tahun 2025.

Secara keseluruhan, berdasarkan data pada table 4, indikator kinerja Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Sedangkan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dari tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.2
Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET			REALISASI		
NO	URAIAN	NO	URAIAN		2023	2024	2025	2023	2024	2025
1		2		3	4			5		
1	Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	1	Persentase kawasan banjir	%	2,64	2,26	1,88	2,34	2,23	1,73
		2	Persentase kawasan rob	%	1,65	1,08	1,05	1,09	1,06	0,98
2	Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	93,00	93,50	94,00	93,00	93,27	94,008
		2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	56,00	86,05	91,91	86,00	91,90	92,44
3	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Skor 1-100	74,80	77,20	77,36	77,05	77,35	77,50
4	Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang pada Dinas Pekerjaan Umum	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang pada Dinas Pekerjaan Umum		Rp	-	278.547.523	278.380.000	-	487.971.000	409.141.000

Berdasarkan Tabel 3.1.2 Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir, kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang secara umum menunjukkan tren positif dan konsisten mencapai target, bahkan sebagian indikator melampaui target yang ditetapkan. Analisis per sasaran dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob

Pada indikator persentase kawasan banjir, target yang ditetapkan mengalami penurunan dari tahun 2023 hingga 2025, yaitu dari 2,64% menjadi 1,88%. Realisasi capaian menunjukkan tren yang lebih baik dibanding target, yakni sebesar 2,34% pada 2023, 2,23% pada 2024, dan 1,73% pada 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian banjir berjalan efektif dan berdampak pada berkurangnya luas kawasan terdampak.

Sementara itu, pada indikator persentase kawasan rob, realisasi juga menunjukkan capaian yang lebih baik dari target setiap tahunnya, yaitu 1,09% (2023), 1,06% (2024), dan 0,98% (2025). Penurunan ini menggambarkan keberhasilan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali rob, seperti sistem drainase, tanggul, serta pompa air.

2. Meningkatnya Fungsi dan Manfaat Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pada indikator persentase jalan dalam kondisi mantap, capaian realisasi relatif stabil dan tinggi, yaitu 93,00% pada 2023, 93,27% pada 2024, dan meningkat menjadi 94,008% pada 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan telah berjalan optimal sehingga mampu mempertahankan kondisi jalan dalam kategori mantap.

Adapun indikator persentase jembatan dalam kondisi baik menunjukkan peningkatan signifikan. Realisasi capaian sebesar 86,00% pada 2023 meningkat menjadi 91,90% pada 2024 dan 92,44% pada 2025. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan dan mencerminkan keberhasilan program rehabilitasi serta peningkatan struktur jembatan dalam mendukung konektivitas wilayah.

3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan capaian yang konsisten melampaui target. Realisasi nilai AKIP tercatat sebesar 77,05 pada 2023, meningkat menjadi 77,35 pada 2024, dan kembali naik menjadi 77,50 pada 2025. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja perangkat daerah yang semakin akuntabel.

4. Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada indikator jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang pada Dinas Pekerjaan Umum, realisasi menunjukkan capaian yang sangat tinggi dibandingkan target. Realisasi sebesar Rp 487.971.000 pada 2024 dan Rp 409.141.000 pada 2025 melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp278.380.000,-. Meskipun terdapat penurunan nominal realisasi pada 2025, capaian tersebut tetap menunjukkan kinerja pendapatan yang optimal dan kontribusi signifikan terhadap PAD.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang selama periode 2023-2025 menunjukkan :

- Penurunan kawasan banjir dan rob secara konsisten.
- Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan.
- Penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- Realisasi PAD yang melampaui target.

Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dapat dinilai efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur kepada masyarakat.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan pada Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang secara rinci capaian masing-masing sasaran strategis dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1) Terwujudnya Manajemen Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan

Optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang

INDIKATOR KINERJA		Tahun 2025			Realisasi tahun 2024
		Target	Realisasi	%	
1.	Persentase kawasan banjir.	1,88	1,84	102,17	2,23%
2.	Persentase kawasan rob.	1,05	0,99	106,6	1,06%

Pada tahun 2025 kinerja yang dicapai adalah berhasil mengurangi persentase kawasan banjir dari yang ditargetkan 1,88% mencapai 1,73%, atau berhasil melampaui target sejumlah 108,67%. Sedangkan

hasil capaian kinerja untuk persentase kawasan rob adalah berhasil mengurangi dari yang ditargetkan 1,25% mencapai 0,98% atau berhasil mencapai target sejumlah 107,14%.

2) Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap

Meningkatnya fungsi dan manfaat sarana dan prasarana jalan, jembatan yang optimal

INDIKATOR KINERJA		Tahun 2025			Realisasi tahun 2024
		Target	Realisasi	%	
1.	Persentase jalan dalam kondisi mantap.	94,00	94,008	100,00	93,27
2.	Persentase jembatan dalam kondisi baik.	91,91	92,44	100,58	91,90

Pada tahun 2025 kinerja yang dicapai untuk persentase jalan dalam kondisi mantap dari yang ditargetkan 94,00% mencapai 94,008%, atau mencapai target sejumlah 100,00%. Sedangkan hasil capaian kinerja untuk persentase jembatan dalam kondisi baik dari yang ditargetkan 91,91% mencapai 92,44% atau berhasil mencapai target sejumlah 100,58%.

Capaian pada urusan Pekerjaan Umum dicapai melalui beberapa kegiatan yang berhasil dilaksanakan, antara lain :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2025			REALISASI TAHUN 2024
		Target	Realisasi	%	
1.	Persentase perencanaan dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum	100	100	100	100
2.	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan dinas pekerjaan umum	100	100	100	100
3.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas PU	100	100	100	100
4.	Persentase peningkatan kemampuan ASN dinas Pekerjaan Umum	100	100	100	100

Pada tahun 2025 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target 100% untuk semua indikator kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan tercapainya target tersebut mendukung kelancaran kinerja OPD dalam melaksanakan program kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan terlaksananya sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta terpenuhinya belanja jasa penunjang administrasi perkantoran, pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan berkala gedung kantor dan kendaraan operasional dinas, sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat serta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

2) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2025			REALISASI TAHUN 2024
		Target	Realisasi	%	
1.	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98,44	98,64	100,20	98,33

Pada tahun 2025 kinerja yang dicapai untuk Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pengendali Banjir Dan Rob dari yang ditargetkan 98,44% mencapai 98,64%.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan berhasil dilaksanakannya Pembangunan Stasiun Pompa Banjir, Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir, Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi, Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir, Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya, Normalisasi/Restorasi Sungai, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, serta Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa.

3) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025			REALISASI TAHUN 2024
	Target	Realisasi	%	
1. Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	67,00	67,00	100	66,00

Pada tahun 2025 kinerja yang dicapai untuk Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dari yang ditargetkan 67,00% mencapai 67,00%

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan berhasil dilaksanakannya sub kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan, sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan dan sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan.

4) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025			REALISASI TAHUN 2024
	Target	Realisasi	%	
1. Tingkat Kualitas Infrastruktur jalan jembatan	75,30	93,224	123,80	92,58

Pada tahun 2025 kinerja yang dicapai untuk Tingkat Kualitas Infrastruktur jalan jembatan dari yang ditargetkan 75,30% mencapai 93,224%

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan berhasil dilaksanakannya sub kegiatan Pengelolaan Leger Jalan, sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, sub kegiatan Pembangunan Jalan, sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan, sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa, sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan, sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan, sub kegiatan Pembangunan Jembatan, sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan, sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan, sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan.

Keberhasilan dalam menekan persentase kawasan banjir dan rob di Kota Semarang ditunjang secara langsung oleh efektivitas pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase. Program Pengelolaan SDA berhasil mencapai tingkat pelaksanaan 98,64%, yang direalisasikan melalui sub kegiatan strategis seperti Pembangunan Stasiun Pompa Banjir, Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, Normalisasi/Restorasi Sungai, serta Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi.

Sementara itu, Program Sistem Drainase turut berkontribusi krusial dalam menunjang penurunan genangan melalui eksekusi sub kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan dan pemeliharaan rutinnya.

Di sisi lain, tercapainya target fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan merupakan hasil nyata dari intervensi Program Penyelenggaraan Jalan. Keberhasilan mempertahankan 94,008% jalan dalam kondisi mantap dan 92,44% jembatan dalam kondisi baik ditunjang oleh serangkaian sub kegiatan fisik yang komprehensif. Kegiatan penunjang tersebut meliputi Rekonstruksi Jalan, Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan, Pemeliharaan Berkala Jalan, hingga kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan yang dieksekusi oleh Bidang Bina Marga maupun UPTD terkait. Penyelenggaraan program-program inilah yang menjadi pilar utama terjaganya kualitas infrastruktur publik sepanjang tahun.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada Tahun 2025 didukung dengan anggaran yang direncanakan sejumlah **Rp. 384.078.990.970,00,-** dan terealisasi sejumlah **Rp 280.086.921.946,00,-** dengan capaian kinerja anggaran sebesar **72,92%**.

Capaian Kinerja Keuangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1
Rincian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
DINAS PEKERJAAN UMUM				
DINAS PEKERJAAN UMUM				
		384.078.990.970	280.086.921.946	72,92
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.921.600	80.607.155	75,39
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.171.600	11.219.440	37,19
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4.764.900	4.704.100	98,72
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.370.900	1.792.900	41,02
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.964.100	4.347.300	87,57
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.370.900	4.046.500	92,58
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3.698.200	3.254.680	88,01
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.581.000	2.193.000	47,87
01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	49.049.235	98,10
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.811.635.537	29.785.817.390	83,17
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.829.333.837	29.281.405.150	84,07
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	973.315.700	495.800.000	50,94
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.359.400	2.165.240	91,77
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	3.706.200	3.605.200	97,27
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.920.400	2.841.800	97,31
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.554.200	3.773.000	82,85
03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.459.400	1.346.800	92,28
03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.004.800	2.426.200	78,40
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.434.200	2.775.000	37,33
05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.954.200	2.775.000	93,93
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.872.401.106	1.246.773.884	66,59
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	227.061.224	170.367.936	61,49
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	408.581.700	376.832.436	92,23
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.000.000	74.988.000	99,98
06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	377.133.551	148.590.510	58,93
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.000	-	00,00

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE [%]
06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	187.814.351	161.786.384	86,14
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	407.379.872	55.534.409	13,63
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	239.401.408	235.274.209	98,28
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.000	-	00,00
07.05	Pengadaan Mebel	29.000	-	73,33
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.025.074.048	25.506.493.654	91,01
08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.283.000	17.530.000	90,91
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.767.099.241	8.469.229.464	90,75
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.238.691.807	17.019.734.190	93,32
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.312.339.411	7.970.547.358	85,59
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	2.876.642.019	2.033.347.182	70,68
09.05	Pemeliharaan Mebel	75.000.000	73.995.600	98,66
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	331.417.392	298.021.225	89,92
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.498.057.000	1.422.139.171	94,93
09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	4.531.223.000	4.143.044.180	91,43
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	57.920.001.459	43.000.341.092	74,24
2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantal pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.576.230.845	34.097.496.224	70,19
01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	2.000.000.000	1.960.448.376	98,02
01.28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	23.300.675.000	19.894.041.032	85,38
01.82	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	989.236.374	981.994.080	99,27
01.85	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	20.198.383.285	9.214.050.306	45,62
01.89	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	720.225.715	705.275.087	97,92
01.93	Normalisasi/Restorasi Sungai	857.106.800	845.022.528	98,59
01.128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	510.603.670	496.664.815	97,27
2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.343.770.614	8.902.844.868	95,28
02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	9.043.770.614	8.611.108.541	95,22
02.35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	300.000.000	291.736.327	97,25

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	57.820.510.920	46.467.750.164	80,37
2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	57.820.510.920	46.467.750.164	80,37
01.24	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	30.662.200.000	20.411.652.182	66,57
01.30	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2.959.875.000	2.798.094.648	94,53
01.31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	24.198.435.920	23.258.003.334	96,11
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	137.436.161.217	81.010.470.342	58,94
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	137.436.161.217	81.010.470.342	58,94
01.28	Pengelolaan Leger Jalan	325.055.316	312.348.450	96,09
01.29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.482.380.000	2.400.735.572	96,71
01.32	Pembangunan Jalan	3.500.000.000	2.742.977.624	78,37
01.33	Rekonstruksi Jalan	9.341.534.924	9.069.534.625	97,09
01.34	Pemeliharaan Berkala Jalan	71.891.672.313	32.865.684.052	45,72
01.36	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	999.259.000	682.125.638	68,26
01.38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	900.000.000	316.260.487	35,14
01.39	Rehabilitasi Jembatan	11.600.000.000	826.275.970	7,14
01.40	Pembangunan Jembatan	5.500.000.000	4.714.040.935	85,71
01.43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	572.211.664	550.586.227	96,22
01.44	Rehabilitasi Jalan	13.751.083.000	11.963.657.048	87,00
01.46	Pemeliharaan Rutin Jalan	16.572.965.000	14.566.243.714	87,89
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I	2.241.196.255	2.192.853.200	97,84
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.241.196.255	2.192.853.200	97,84
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.241.196.255	2.192.853.200	97,84
01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.241.196.255	2.192.853.200	97,84
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV	2.358.688.887	2.271.519.279	96,30
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.289.038.319	2.248.213.545	98,22
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.289.038.319	2.248.213.545	98,22
01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.289.038.319	2.248.213.545	98,22
	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum	34.532.538.962	24.339.005.588	70,48
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	31.536.493.560	24.339.005.588	77,18
2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung	31.536.493.560	23.791.327.500	75,44

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	31.536.493.860	23.791.327.500	75,44
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.996.045.402	547.678.088	18,28
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.996.045.402	547.678.088	18,28
01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	2.996.045.402	547.678.088	18,28
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II	4.414.472.583	4.196.979.151	95,07
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	4.414.472.583	4.196.979.151	95,07
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	4.414.472.583	4.196.979.151	95,07
01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.414.472.583	4.196.979.151	95,07
	UPTD Peralatan dan Perbengkelan	9.170.825.140	9.028.869.673	98,45
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	9.170.825.140	9.028.869.673	98,45
2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.170.825.140	9.028.869.673	98,45
01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	9.170.825.140	9.028.869.673	98,45
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III	3.113.857.013	3.005.651.750	96,53
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	3.113.857.013	3.005.651.750	96,53
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	3.113.857.013	3.005.651.750	96,53
01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.113.857.013	3.005.651.750	96,53

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran, meskipun dengan keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) dan sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang semua target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

3.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi 3 yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang didukung oleh ASN sejumlah 598 pegawai yang terdiri dari 107

orang PNS, 364 orang PPPK serta 127 orang PPPK Paruh Waktu yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.1.
Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025

No	Uraian Jenis Aset	2024			2025		
		Jumlah (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	%	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	%
1	Gedung Kantor	54	54	100	54	54	100
2	Alat-alat Berat						
	a. Wheel Excavator	8	8	100	8	1	
	b. Excavator Spider	1	1	100	1	1	
	c. Mini Excavator	12	12	100	12	12	
	d. Excavator Standard	3	3	100	3	3	
	e. Excavator Long Arm	4	4	100	4	4	
	f. Buldozer	2	2	100	2	2	
	g. Amphibious Long Arm	2	2	100	2	2	
	h. Amphibious Mini Long Arm	8	8	100	8	8	
	i. Backhoe Loader	2	1	50	1	1	100
	j. Grader	1	1	100	1	1	
	k. Finisher	1	1	100	1	1	
	l. Single Drum Roller	1	1	100	1	1	
	m. Coldmilling	1	1	100	1	1	
	n. PTR (Pneumatic Tyre Roller)	1	1	100	1	1	
	o. TR Double Drum 4 ton	6	6	100	6	6	
	p. TR Besar Double Drum	1	1	100	1	1	
	q. TR Kombinasi 4 ton	6	6	100	6	6	
	r. Prahua Ponton Pengambil Sampah	2	2	100	2	2	
3	Alat-alat Angkut						
	a. Mobil Pick Up	51	51	100	51	51	100
	b. Dump Truck	49	49	100	49	49	100
	c. Roda Dua	47	47	100	47	47	100
	d. Mobil Station	16	16	100	16	16	100
	e. Roda Tiga	3	3	100	3	3	100
4	Alat-alat lainnya						
	a. Komputer PC	120	120	100	120	120	100
	b. Laptop	65	6	90,76	65	4	
	c. Printer	100	100	60,9	100	100	69,1
	d. Sound System	2	2	100	2	2	100
	e. Filing Kabinet	58	58	100	58	58	100
	f. Theodolit	1	1	100	1	1	100

Pencapaian seluruh target sasaran strategis instansi tidak terlepas dari dukungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang ada. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengoptimalkan kinerja 598 pegawai, yang terdiri dari unsur PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu, untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai jadwal. Keterbatasan jumlah personel di lapangan disiasati dengan pengoperasian sarana dan prasarana penunjang secara bergilir dan efisien, seperti pengerahan armada dump truck, ekskavator, dan alat berat lainnya yang mayoritas berada dalam kondisi baik dan layak operasi.

Di samping efisiensi sarana dan SDM, Dinas Pekerjaan Umum juga berhasil mencatatkan tingkat efisiensi sumber daya anggaran yang sangat signifikan. Pada tahun 2025, alokasi anggaran yang direncanakan adalah sebesar Rp 384.078.990.970,00, sedangkan realisasi penyerapan tercatat sebesar Rp 280.086.921.946,00 atau mencapai capaian kinerja anggaran sebesar 72,92%. Sisa pagu anggaran yang tidak terserap ini merupakan bentuk penghematan (efisiensi) yang bernilai positif, mengingat seluruh target kinerja fisik IKU, seperti persentase kawasan banjir, jalan mantap, dan kondisi jembatan, berhasil dicapai bahkan melampaui target 100% dari yang ditetapkan.

3.5. PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Keberhasilan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2025 ditandai dengan terlampauinya target pada beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU). Persentase kawasan banjir berhasil ditekan menjadi 1,73% dari target 1,88%, sementara kawasan rob turun menjadi 0,98% dari target 1,05%. Peningkatan kinerja ini juga terlihat pada kemantapan jalan yang mencapai 94,008% dan kondisi jembatan baik sebesar 92,44%. Meskipun target secara umum tercapai, upaya pemenuhan kinerja ini sempat dihadapkan pada kendala utama berupa kapasitas sistem drainase eksisting yang belum mampu menampung debit air hujan secara maksimal. Kondisi ini memicu genangan berkepanjangan yang tidak hanya membawa tumpukan sampah, tetapi juga berdampak langsung pada penurunan kualitas struktur jalan seperti retak, berlubang, dan ambles.

Penurunan kualitas jalan tersebut pada akhirnya meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas, terutama saat hujan.

Sebagai alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mempertahankan kinerja dan mengatasi kendala tersebut selama tahun berjalan, Dinas Pekerjaan Umum telah mengintensifkan normalisasi saluran drainase melalui pembersihan sampah dan sedimen secara berkala. Selain itu, untuk mengamankan target kemantapan jalan dari dampak genangan, tim di lapangan telah melakukan perbaikan darurat pada ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan berat akibat curah hujan. Optimalisasi pencegahan juga telah dilakukan melalui pemeriksaan dan perawatan rutin stasiun pompa banjir, memastikan seluruh mesin dan suku cadang berfungsi optimal untuk mempercepat durasi surutnya air.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP juga merupakan bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan Dasar Anggaran Satuan Kerja termasuk dana Anggaran Tambahan (APBD – Perubahan) terdiri dari Program dan Kegiatan SKPD.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pegawai dan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan seluruh Kota Semarang.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang antara lain:

1. Meningkatkan optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang.
2. Meningkatkan kondisi jalan dan jembatan.
3. Meningkatkan fungsi dan manfaat jalan dan jembatan serta infrastruktur pendukungnya.

Dengan demikian diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah sehingga tidak hanya wacana semata untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam pembangunan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan pihak-pihak terkait harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.